



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
UNIT KERJA : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MUHTARUDIN**
2. Jabatan : **KEPALA BADAN**
3. NHK : **155600**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.180.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 258 m²/49 m² di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 172 m²/36 m² di KAB / KOTA PONTIANAK, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah Seluas 100000 m² di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m²/110 m² di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
5. Tanah Seluas 379 m² di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 319.650.000

1. MOTOR, SUZUKI SATRIA FU SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 11.150.000
2. MOBIL, HONDA HONDA HR - V Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 20.500.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 10.407.866

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.530.557.866



III. HUTANG

Rp. 501.145.683

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.029.412.183

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.